

Masjid dan Kekuasaan



Heri Priyatmoko

Dosen Sejarah, Universitas Sanata Dharma Sejarawan Solo

Lebih dari tiga dasawarsa silam, Taman Hiburan Remaja (THR) yang gagah itu mulai berdiri di Kebon Rojo atau Sriwedari. Ruang publik di tengah kota ini tambah bergairah berkat kehadirannya. THR akhirnya menjadi oase bagi warga kota, terutama *wong cilik* yang pontang-panting mengejar derap pembangunan kota. Dia pulalah titik simpul warga Soloraya bersemuka seraya berdentang ria.

Kemarin, bak petir menyambar di siang bolong. Terbit kabar perihal penolakan perpanjangan izin sewa lahan THR oleh Pemkot Surakarta. Lahan tersebut hendak dipakai untuk masjid raya Solo. Secara kolektif, Kebon Rojo dimaknai sebagai ruang budaya. Maka, keputusan lembaga plat merah ini memantulkan sikap ahistoris. Sulit membayangkan, kelak tersulut "pertarungan" atau "perebutan" identitas ruang. Taruhlah misal, tampilan busana tradisional wayang orang Sriwedari kontras dengan pakaian para perempuan yang berangkat beribadah maupun pengajian di masjid raya. Pemain WO jelas tak mungkin bersalin kostum atau *blur*, bukan?

Jika neraca sejarah kekuasaan menimbang, ide pendirian masjid raya di Taman Sriwedari sesungguhnya bukan legitimasi yang tepat untuk pimpinan daerah yang bersifat *legal-formal*. Sekarang, situasinya jauh beda dengan era kerajaan yang butuh Masjid Gedhe sebagai simbol kekuasaan dan mengokohkan posisi raja sebagai Sayidin Panatagama Kafilatullah.

Dengan sifat kekuasaan absolut, raja gampang menitahkan rakyat guna mengerjakan sesuatu demi kepentingan kerajaan. Seperti mendirikan keraton baru di Desa Sala (1745), Paku Buwana II leluasa



Gedhe. Masjid agung periode awal Kerajaan Kasunan, mustahil diklaim milik masyarakat kendati yang bikin adalah *abdi dalem* secara gotong-royong dalam pengertian tidak menerima upah dan bertujuan mewujudkan misi *Sinuwun*. Kerja mereka dipahami sebagai pengabdian kepada kerajaan dan upaya berkabung dengan kekuasaan istana yang prestisius. Makin banyak yang terlibat, berarti proses pembuatan masjid kian cepat rampung, walau tidak sempurna atau semegah bangunan yang sekarang.

Bangunan Masjid Gedhe masa Paku Buwana II hanya di bagian dalam saja. Itu pun masih berbentuk sederhana. Sang kala terus merangkak, ada tahapan pengembangan pembangunan masjid. Sebagai contoh, ruang *Pawestren* berada di samping kiri-kanan dan menyerupai dapur digarap Paku Buwana VIII (1830-1875). Demikian pula pembangunan Serambi yang mirip pendapa di rumah tradisional priyayi.

Selepas bangunan *Pawestren* kelar, raja lantas meninjau lokasi. Ahli sejarah Islam Jawa, G. F. Pijper, mengemukakan bahwa Sushunan dan pengikutnya manakala mengunjungi Masjid Gedhe diikuti para wanita pelayan istana. Paku Buwana VIII berpakaian Arab. Pada kesempatan ini beliau tidak memakai

Berkaca dari tenunan cerita di atas, bila dicermati dari perspektif tata ruang, rencana pendirian masjid raya berada di Taman Sriwedari sejatinya tidaklah tepat.

ngannya. Para pangeran juga menggunakan pakaian Arab dan tongkat, yang lain berpakaian resmi Jawa berupa *dotot* atau *bebet* menurut tangga kepangkatan. Sementara barisan perempuan mengenakan *tapih* atau *dotot* tanpa *kemben*.

Dalam riset saya bareng tim Masjid Agung Surakarta (2014) membeberkan bahwa raja dan keluarga aristokrat wajar memperoleh perlakuan istimewa dibanding kelompok sosial lainnya di ruang Masjid Gedhe. Sebab, mereka diakui sebagai golongan yang punya otoritas di wilayah kekuasaan kerajaan, tanpa kecuali urusan politik keagamaan. Menyoal status kepemilikan Masjid Gedhe Surakarta, detik itu jelas sekali milik Paku Buwana II atau masjid "negara", tidak seperti masjid di pedesaan, apalagi posisinya berada di area pusat pemerintahan. Oleh karenanya, masyarakat tidak berwenang dan tidak mungkin tumbuh perasaan memiliki layaknya masjid di daerah pedesaan. Mereka hanya sebatas menggunakannya saja.

Mengenai bahan bangunan. Masjid Gedhe me-

(1983), pemakaian bata di Jawa telah mengada sejak periode Majapahit. Namun, pemakaian bata waktu itu terbatas pada tembok pemagar dan pelapis lantai, bagian dari bangunan yang tidak membentuk konstruksi. Begitu pula candi dari bata bukanlah bangunan yang merupakan konstruksi yang membentuk ruangan, tapi lebih cenderung berupa tumpukan bata yang dibentuk. Ketebalan bata untuk masjid kala itu tidak diragukan lagi. Pakar sejarah masjid di tanah Jawa, Ramli Nawawi (2000) menyebut, di masa lalu bata asli lumrah berwarna coklat kemerah-merahan, berukuran 40 cm x 40 cm setebal 10 cm.

Seperti umumnya bangunan di Jawa tidak memakai tongkat sehingga tidak terdapat kolong di bawah lantai. Kalau di pulau Jawa lantai masjid langsung di tanah, sedangkan lantai masjid tua di daerah lainnya umumnya memakai tongkat. Hal itu lantaran tanahnya berupa dataran rendah atau daerah rawa. Tetapi selanjutnya banyak masjid tua yang lantainya pakai tongkat, lalu diurug

tai Masjid Gedhe yang tingginya kurang lebih 1 meter dari dasar tanah tersebut adalah tumpukan bata yang disusun seluas ukuran masjid. Namun, tumpukan bata itu sekarang tak bisa dilihat lagi, karena sudah ada peluasan seluruh bagian sisi masjid dan juga bagian atasnya telah dilapisi bahan marmar.

Demikianlah proses historis pembuatan Masjid Gedhe Surakarta sebagai syarat utama dari sebuah tata ruang kota kerajaan dinasti Mataram Islam yang telah dibakukan oleh para raja pendahulu. Dapat dimengerti, fungsi masjid tempo dulu tidak sekadar ruang ibadah masyarakat, tetapi juga mengandung nilai filosofis tata ruang kota dan ekspresi hegemoni kerajaan tradisional Jawa terhadap agama Islam.

Berkaca dari tenunan cerita di atas, bila dicermati dari perspektif tata ruang, rencana pendirian masjid raya berada di Taman Sriwedari sejatinya tidaklah tepat. Nyaris miskin tautan makna sosiologis, historis, dan antropologis lantaran memang bukan di situ tempatnya. Jika betul-betul terlaksana ide tersebut, pembangunan masjid raya ini salah *kedaden* dan mengingkari realitas sejarah kultural. Pemkot juga menggali lubang kubur untuk menenggelamkan memori masyarakat akan keberadaan THR yang turut mewarnai